

REFERENSI

Buku dan Jurnal

- Ariani, A., & Syakti, L. A. (2013). Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan TKI Ke Luar Negeri Menggunakan FMADM. *Jurnal Sistem Informasi*, 337-343.
- Ashish K. Vaidya. (2006). *Globalization: Encyclopedia of Trade, Labor, and Politics*. California: ABC-CLIO.
- Asmoro, C. W., & Adityo, A. (2011). Peningkatan Kapasitas Serikat/Organisasi Buruh Migran Indonesia dan Penguatan Strategi Advokasi. *Workshop Buruh Migran Regional* (pp. 1-39). Cimanggis: Institute For National and Democratic Studies (INDIES) Indonesia.
- Azmy, A. S. (2011). *Negara dan Buruh Migran Perempuan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- BPS. (2010). *Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Council of Europe. (1977). *European Convention on The Legal Status of Migrant Workers*. Strasbourg: European council.
- Farbenblum, B., Taylor-Nicholson, E., & Paoletti, S. (2013). *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal : Studi Kasus Indonesia*. New York: Open Society Foundations.
- Fihartoma, D. (2004). *Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Frihartomo, D. (2004). *Perlindungan Hukum Buruh Migran Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Guuild, E. (1999). *The European Convention on The Legal Status of Migrant Workers : An Analysis of its Scope and Benefits*. Belanda: University of Nijmegen.
- Guuild, E. (1999). *The European Convention on The Legal Status of Migrant Workers : An Analysis of its Scope and Benefits*. Nijmegen: University of Nijmegen.
- Guild, E., & Niessen, J. (2006). *Immigration and Asylum Law And Policy in Europe*. Boston: The Netherlands.
- Hidayati, N. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI). *Pengembangan Humaniora*, 207-212.
- Husna, F. K. (2013). *Kajian Kebijakan Pemerintah Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Husna, F. K. (2014). *Kajian Kebijakan Pemerintah Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- IOM. (2010). *Labour Migration from Indonesia*. Jakarta: International Organization for Migration.
- Karya, S. (2011). *Negara dan Buruh Migran Perempuan*. Jakarta: FISISPUI.
- Kementerian Kebijakan Nasional BEM KM IPB. (2011). *Tenaga Kerja Indonesia, Pahlawan Devisa Tanpa Perlindungan*. *Institut Pertanian Bogor*, 1-15.

- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2011, Januari 15). *Diplomasi. Media Komunikasi dan Interaksi*, pp. 1-24.
- Komnas Perempuan. (2003). *Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga Indonesia*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan.
- Lemhannas RI. (2013). "Grand Design Pelaksanaan TKI Ke Luar Negeri guna Menjaga Harkat dan Martabat Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional". *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 65-75.
- Maladi, S. (2004). *Globalisasi dan Implikasinya Bagi Perlindungan Hukum Pekerja Migran*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Maladi, S. (2004). *Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya bagi Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Morales, L., & Giugni, M. (2011). *Social Capital, Political Participation and Migration in Europe Making Multicultural Democracy Work?* New York: PALGRAVE MACMILLAN.
- Rofiah, N., & Nadjib, A. (2010). *Mari Kenali Hak-Hak Buruh Migran Indonesia Perspektif Islam dan Perempuan*. Jakarta: PP Fatayat NU.
- Sabhana, A. (2004). *Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sefriani. (2013). Perlindungan HAM buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum dan Hukum HAM Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 246-256.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2015, Mei 27). *Sekretariat Negara Republik Indonesia*. Retrieved from www.setneg.go.id: <http://www.setneg.go.id>
- Soerjosoeminar, E. R. (2011). *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Dalam Perspektif UU RI No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri*. Semarang: UNDIP.
- Subhan, H. (2012). *Perlindungan Tki Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham.
- Sudjatmiko, B. (2010). *Kasus TKI Bermasalah Harus Dituntaskan*. Jakarta: Suara Karya.
- Tati Krisnawaty; Rusdi Tagaroa. (2003). *Kerentanan dan Inisiatif-Inisiatif Baru Untuk Perlindungan Hak Asasi TKW-PRT*. KUALA LUMPUR: Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Solidaritas Perempuan/CARAM).
- TIMedia (Director). (2014). *KTLN Tidak Berguna* [Motion Picture].
- Wahyu, F. (2011). Kondisi Buruh Migran Indonesia di Macau. *Workshop Buruh Migran Regional* (pp. 24-39). Cimanggis: Institute For National and Democratic Studies (INDIES).
- World Bank. (2014). *World Development Indicators database*. New York: World Bank.

Website

- Pemulangan TKI tidak berdokumen lengkap oleh pemerintah Malaysia
<http://www.jpnn.com/read/2016/02/05/354884/Dokumen-tak-Lengkap,-Ratusan-TKI-Dipulangkan-Dari-Malaysia>, di akses pada 11 November 2015
- Inspeksi mendadak oleh Menteri Tenaga kerja ke penampungan TKI.
<http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-2/3722/dobrak-pagar,-menaker-bongkar-penampungan-tki-tak-layak#.VzKXR9J97IU>, di akses pada 11 November 2015
- Komentar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 30 November 2014.
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/30/180509726/Jokowi.KTKLN.Dihapus> di ambil pada 11 Desember 2015
- Publikasi BNP2TKI.
<http://www.bn timer2tki.go.id/yandu/indeks> di ambil pada 10 Oktober 2015
- Korban kejahatan seksual menurut BNP2TKI.
http://www.bn timer2tki.go.id/hasil_penelitian/indeks di ambil pada 10 Oktober 2015
- Kecelakaan dalam bekerja. Lihat <http://www.merdeka.com/peristiwa/kecelakaan-kerja-tki-asal-sragen-meninggal-di-korsel.html> di ambil pada 12 maret 2016
- Definisi deportasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
<http://kbbi.web.id/deportasi> di akses pada 10 April 2016
- Deportasi yang di lakukan oleh pemerintah Malaysia.
<http://www.suara.com/news/2016/04/09/081630/sepanjang-2016-1489-tki-bermasalah-di-malysiadideportasi> di ambil pada 10 april 2016
- Definisi repatriasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
<http://kbbi.web.id/repatriasi> di akses pada 10 april 2016
- BNP2TKI Kawal Pemulangan TKI dari Suriah ke Kampung Halamannya.
<http://www.bn timer2tki.go.id/read/10672/BNP2TKI-Kawal-Pemulangan-TKI-dari-Suriah-ke-Kampung-Halamannya>, di akses 12 Februari 2016
- Terminal Khusus TKI di Bandara Picu Pemerasan
<http://www.voaindonesia.com/content/terminal-khusus-tki-di-bandara-picu-pemerasan-/2410036.html> diambil pada 15 Maret 2016
- Lemahnya perlindungan di Indonesia,
<https://nasional.tempo.co/read/news/2012/04/28/173400357/pemerintah-akui-perlindungan-tki-masih-lemah> di akses pada 5 Juni 2016
- Perlindungan yang TKI masih lemah
<http://www.antarane ws.com/berita/499908/legislator-nilai-perlindungan-tki-masih-lemah> di akses pada tanggal 11 November 2015
- KTKLN bagi TKI dinilai sebagai bukti lemahnya sistem administrasi dan pengelolaan manajemen kependudukan yang dimiliki pemerintah,
<http://nasional.sindone ws.com/read/978580/149/ktkln-bukti-lemahnya-administrasi-pemerintah-1426736617>, di akses pada 31 Januwari 2016
- KTKLN memuat informasi lengkap TKI,
<http://www.tribunnews.com/nasional/2011/11/26/tki-wajib-memiliki-ktkln>, di akses pada 20 Januwari 2016
- Takut pulang cuti karena KTKLN,

- [http://www.kompasiana.com/dewiemariyana/ktkln-kartu-sakti-yang-buat-
tki-takut-pulang-cuti_54f3d979745513992b6c81e1](http://www.kompasiana.com/dewiemariyana/ktkln-kartu-sakti-yang-buat-tki-takut-pulang-cuti_54f3d979745513992b6c81e1) di akses pada 3
Desember 2015
- Pemerintah Ganti Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dengan Sidik Jari Biometrik,
[http://nasional.kompas.com/read/2015/02/12/20235081/Pemerintah.Ganti.K
artu.Tenaga.Kerja.Luar.Negeri.dengan.Sidik.Jari.Biometrik](http://nasional.kompas.com/read/2015/02/12/20235081/Pemerintah.Ganti.Kartu.Tenaga.Kerja.Luar.Negeri.dengan.Sidik.Jari.Biometrik), di akses pada
20 Januari 2016
- Jokowi: KTKLN Dihapus!
[http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/30/180509726/Jokowi.KT
KLN.Dihapus](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/30/180509726/Jokowi.KTKLN.Dihapus). Di akses pada 20 Januari 2016
- BNP2TKI Mengapresiasi Diluncurkannya Pemantauan PPTKIS,
[http://www.bnptki.go.id/read/9689/BNP2TKI-Mengapresiasi-
Diluncurkannya-Pemantauan-PPTKIS](http://www.bnptki.go.id/read/9689/BNP2TKI-Mengapresiasi-Diluncurkannya-Pemantauan-PPTKIS), di akses pada 20 Januari 2016
- Anggota Komisi IX DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak pemerintah untuk
merevisi Undang-undang tentang ketenagakerjaan dan perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di luar negeris,
[http://www.cnnindonesia.com/politik/20160224115013-32-
113137/perlindungan-tnk-rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu/](http://www.cnnindonesia.com/politik/20160224115013-32-113137/perlindungan-tnk-rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu/), di akses
pada 20 Mei 2016
- Laporan berita Viva, TKI Bermasalah Selalu Diabaikan,
[http://www.viva.co.id/ramadan2016/read/289251-laporan-tnk-bermasalah-
selalu-diabaikan](http://www.viva.co.id/ramadan2016/read/289251-laporan-tnk-bermasalah-selalu-diabaikan) diakses pada 28 Juni 2016
- Tugas Crisis Center BNP2TKI
<http://halotki.bnptki.go.id> di akses pada 2 Juli 2016
- Sosialisasi Prosedur pengaduan pada Call Center BNP2TKI,
[http://www.bnptki.go.id/read/9530/Deputi-Perlindungan-BNP2TKI-:-
Pengaduan-Kasus-TKI-Dilayani-dengan-Hati](http://www.bnptki.go.id/read/9530/Deputi-Perlindungan-BNP2TKI-Pengaduan-Kasus-TKI-Dilayani-dengan-Hati) di akses pada 21 Juli 2016
- TKI Selamat dari Penyekapan di Malaysia
[http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/21/nrt3r-14-tnk-
selamat-dari-penyekapan-di-malaysia](http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/21/nrt3r-14-tnk-selamat-dari-penyekapan-di-malaysia) di akses pada 21 juli 2016
- Perlindungan TKI Rendah, DPR Desak Pemerintah Revisi UU,
[http://www.cnnindonesia.com/politik/20160224115013-32-
113137/perlindungan-tnk-rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu/](http://www.cnnindonesia.com/politik/20160224115013-32-113137/perlindungan-tnk-rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu/) di akses
pada 30 Juni 2016
- Menteri Yohana Ungkap 7 Kelemahan UU TKI,
[http://www.beritasatu.com/nasional/287806-menteri-yohana-ungkap-7-
kelemahan-uu-tnk.html](http://www.beritasatu.com/nasional/287806-menteri-yohana-ungkap-7-kelemahan-uu-tnk.html) di akses pada 30 Juni 2016
- How many states have ratified human rights treaties?*
[http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/en/topics/development/frquently-asked-questions/](http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/topics/development/frquently-asked-questions/) di
akses pada 21 Juli 2016
- Ratifications of International Instruments On Migration/Migrants Rights,*
www.ilo.org/ilolex di akses pada 21 Juli 2016.
- Indonesia dinilai belum optimal mengimplementasikan Konvensi ILO Tahun
1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya yang sudah
diratifikasi lewat UU No 6 Tahun 2012.
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d05a04c2ffc/perlindungan-
tnk-tak-cukup-dengan-ratifikasi-konvensi](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d05a04c2ffc/perlindungan-tnk-tak-cukup-dengan-ratifikasi-konvensi) di akses pada 21 Juli 2016

Definisi Kafalah,

<http://www.arti-definisi.com/Kafalah> di akses pada 21 Juli 2016

Sistem Kafalah, Salah Satu Hambatan Perlindungan TKI di Saudi

<http://international.sindonews.com/read/1039953/43/sistem-kafalah-salah-satu-hambatan-perlindungan-tki-di-saudi-1441198765> Di akses pada 30 Juni

2016